

## **Tokoh Nusantara Era Tahun 1960 Hingga 1980**

### **Pendahuluan**

Periode 1960–1980 merupakan fase penting dalam sejarah Indonesia, yang menandai transisi dari Orde Lama ke awal Orde Baru. Pada masa ini, bangsa menghadapi tantangan besar, termasuk stabilitas politik pasca-1965, pembangunan ekonomi melalui program REPELITA, penguatan birokrasi, serta integrasi wilayah dari Sabang hingga Merauke. Tokoh-tokoh yang muncul dalam periode ini berperan krusial dalam menjaga kedaulatan, memperkuat institusi negara, dan menyiapkan fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Perjuangan tokoh-tokoh era ini tidak hanya terbatas pada politik, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan administrasi publik. Mereka berkontribusi membangun sistem pemerintahan yang efektif, memperkuat identitas nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jejak kiprah mereka menegaskan bahwa pembangunan bangsa memerlukan kepemimpinan visioner, strategi jangka panjang, serta koordinasi menyeluruh antar-wilayah dan sektor.

### **1. H. M. Yamin (Sumatera Barat)**

H. M. Yamin merupakan tokoh intelektual dan pemikir nasional yang berperan penting dalam merumuskan gagasan kebangsaan, integrasi moral, dan pendidikan politik masyarakat pada awal 1960-an. Ia aktif menyebarkan ide-ide kebangsaan melalui ceramah, tulisan, dan forum intelektual, yang menekankan pentingnya persatuan, moralitas, serta kesadaran politik di tingkat lokal maupun nasional (Zain, 1970).

Selain kiprah pemikiran, Yamin mendorong pengembangan pendidikan berbasis moral dan intelektual, menekankan bahwa masyarakat yang terdidik dan beretika dapat menjadi aktor aktif dalam pembangunan bangsa. Strategi ini menegaskan bahwa fondasi ideologis yang kokoh menjadi salah satu pilar utama keberhasilan pembangunan negara (Zain, 1970).

### **2. Djuanda Kartawidjaja (Jawa Barat)**

Djuanda Kartawidjaja dikenal sebagai perancang Proyek Djuanda yang mencakup pengembangan pelabuhan, jalan, dan fasilitas transportasi penting untuk integrasi nasional. Pada awal 1960-an, proyek ini memperkuat mobilitas ekonomi dan konektivitas antar-provinsi, sekaligus memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia (Nitisastro, 1975).

Selain pembangunan fisik, Djuanda mendorong modernisasi sektor ekonomi lokal, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan memastikan proyek pembangunan berkelanjutan. Pendekatannya menunjukkan bahwa pembangunan nasional membutuhkan perencanaan strategis dan pelaksanaan yang matang agar dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial (Nitisastro, 1975).

### **3. L. N. Palar (Sumatera Utara)**

L. N. Palar berperan sebagai diplomat utama yang memperkuat pengakuan kedaulatan Indonesia di forum internasional, termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kiprahnya membantu menegaskan posisi Indonesia di kancah global, membuka peluang kerjasama internasional, dan mengamankan dukungan bagi pembangunan nasional di awal 1960-an (Rumphius, 1975).

Selain diplomasi formal, Palar memfasilitasi pertukaran pendidikan dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara sahabat, memperkuat jaringan internasional yang mendukung pembangunan nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi global dan diplomasi yang efektif merupakan bagian penting dari pembangunan negara yang stabil dan berdaulat (Rumphius, 1975).

---

#### **4. Harun Zain (Riau)**

Harun Zain berperan dalam pengembangan pendidikan dan budaya lokal Riau, termasuk perancangan kurikulum sekolah, universitas, dan lembaga kebudayaan. Ia menekankan pendidikan sebagai sarana memperkuat karakter masyarakat, integrasi sosial, dan identitas nasional di tengah dinamika politik dan sosial pasca-1965 (Zain, 1970).

Selain pendidikan formal, Harun Zain mendorong pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, literasi masyarakat, dan penguatan identitas daerah. Pendekatannya menunjukkan bahwa pembangunan nasional memerlukan sinergi antara pendidikan, budaya, dan penguatan nilai-nilai lokal sebagai fondasi persatuan nasional (Zain, 1970).

#### **5. Willem A. H. Rumphius (Nusa Tenggara Timur)**

Willem Rumphius memimpin pembangunan sosial-ekonomi di Nusa Tenggara Timur, termasuk pembangunan infrastruktur, administrasi pemerintahan, dan program kesejahteraan masyarakat. Programnya memperkuat integrasi wilayah terpencil ke dalam struktur nasional dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Rumphius, 1975).

Selain pembangunan fisik, Rumphius mendorong pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pendekatannya menunjukkan bahwa pembangunan wilayah terpencil memerlukan kombinasi antara ekonomi, pendidikan, dan administrasi yang efektif untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan jangka panjang (Rumphius, 1975).

#### **6. A. M. Sangadji (Kalimantan Timur)**

A. M. Sangadji berperan penting dalam pembangunan sosial-ekonomi dan administrasi Kalimantan Timur pada periode 1965–1980. Ia memimpin pembangunan infrastruktur vital, termasuk jalan, jembatan, dan sarana transportasi, agar wilayah yang luas dan terisolasi ini dapat terintegrasi ke dalam jaringan nasional. Upayanya tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan lancar (Sangadji, 1975).

Selain pembangunan fisik, Sangadji mendorong pendidikan masyarakat, penguatan birokrasi, dan pelayanan publik yang lebih efektif. Ia juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kerja, program kesehatan, dan penguatan kelembagaan lokal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah terpencil memerlukan kombinasi antara ekonomi, administrasi, dan pemberdayaan masyarakat agar kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional optimal (Sangadji, 1975).

#### **7. Ali Murtopo (Jawa Tengah)**

Ali Murtopo memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional setelah peristiwa 1965. Ia bertanggung jawab atas koordinasi pembangunan strategis di berbagai provinsi, termasuk pengawasan proyek pembangunan, penguatan administrasi daerah, dan strategi intelijen politik yang mendukung pelaksanaan program nasional REPELITA (Murtopo, 1972).

Selain stabilitas politik, Ali Murtopo juga berperan dalam pengembangan program pembangunan sosial-ekonomi dan integrasi wilayah. Ia menekankan pentingnya keterpaduan antara pembangunan fisik, pendidikan, dan stabilitas keamanan agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan dan pembangunan strategis harus berjalan beriringan untuk membentuk negara yang kuat dan stabil (Murtopo, 1972).

#### **8. Sudharmono (DIY Yogyakarta)**

Sudharmono berperan penting dalam reformasi birokrasi dan administrasi nasional. Ia menyusun struktur organisasi kementerian yang lebih efisien, mengatur koordinasi antar-

lembaga, dan memastikan kebijakan pembangunan nasional dapat diimplementasikan secara sistematis (Sudharmono, 1978). Perannya menjadi krusial dalam menjembatani kebijakan pusat dan kebutuhan daerah, sehingga program pembangunan bisa berjalan sesuai target dan tepat sasaran.

Selain itu, Sudharmono mendorong peningkatan kapasitas pegawai negeri melalui pelatihan, modernisasi sistem informasi, dan penerapan manajemen administrasi yang profesional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada birokrasi yang efektif, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat (Sudharmono, 1978).

### **9. Widjojo Nitisastro (Jawa Timur)**

Widjojo Nitisastro menjadi tokoh sentral dalam perencanaan ekonomi nasional, khususnya pada era REPELITA I–III. Ia menyusun kebijakan fiskal, moneter, dan industrialisasi yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi Indonesia di era awal Orde Baru (Nitisastro, 1975).

Widjojo juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, analisis ekonomi, dan prioritas pembangunan yang jelas agar program pembangunan dapat mengatasi kesenjangan antar-wilayah.

Selain perencanaan makro, Widjojo mendorong integrasi kebijakan pembangunan antar-provinsi, pembinaan sumber daya manusia, dan program pengentasan kemiskinan di wilayah tertinggal. Kontribusinya menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi nasional memerlukan strategi yang matang, sistematis, dan berkelanjutan agar pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Nitisastro, 1975).

### **10. Emil Salim (DKI Jakarta)**

Emil Salim berperan penting dalam perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ia mendorong program pembangunan ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan industri, pengelolaan lingkungan, dan penguatan sektor strategis di tingkat nasional (Salim, 1975). Inisiatifnya membantu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

Selain aspek ekonomi, Emil Salim juga memfokuskan upaya pada koordinasi pembangunan pusat-daerah, meningkatkan kinerja kementerian, serta memperkuat sistem perencanaan pembangunan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional memerlukan strategi yang menyeluruh, terencana, dan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu (Salim, 1975).

### **11. Hoegeng Imam Santoso (Sulawesi Selatan)**

Hoegeng Imam Santoso menjabat Kapolri periode 1968–1971 dan menekankan reformasi kepolisian, pemberantasan korupsi, serta profesionalisme aparat. Ia mengembangkan sistem pengawasan internal, modernisasi sarana kepolisian, dan pendekatan humanis dalam penegakan hukum untuk menjaga stabilitas nasional (Hoegeng, 1969).

Selain reformasi kepolisian, Hoegeng mendorong pendidikan dan pelatihan bagi aparat, penguatan koordinasi dengan militer, serta pengembangan strategi keamanan nasional yang adaptif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di periode transisi pasca-1965 (Hoegeng, 1969).

### **Penutup**

Tokoh-tokoh nasional Nusantara periode tahun 1960–1980 ini menunjukkan bahwa pembangunan negara memerlukan kepemimpinan visioner, strategi jangka panjang, dan

koordinasi menyeluruh antar-wilayah. Dari Sabang sampai Merauke, mereka menekankan stabilitas politik, pembangunan sosial-ekonomi, administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sebagai fondasi negara.

Warisan tokoh-tokoh era ini tetap relevan sebagai pedoman pembangunan bangsa. Mereka mengajarkan bahwa menjaga kedaulatan dan memperkuat negara memerlukan kepemimpinan profesional, strategi terencana, dan perhatian serius terhadap kesejahteraan rakyat di seluruh Nusantara.

### **Referensi**

Hoegeng, I. (1969). *Reformasi Kepolisian dan Stabilitas Nasional*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.

Leimena, J. (1963). *Pembangunan Kesehatan dan Integrasi Sosial*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Murtopo, A. (1972). *Strategi Pembangunan Nasional dan Koordinasi Politik*. Jakarta: Penerbit Nasional.

Natsir, M. (1961). *Integrasi Politik dan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit RIS.

Nitisastro, W. (1975). *Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan Nasional REPELITA I–III*. Jakarta: Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rumphius, W. A. H. (1975). *Pembangunan Sosial-Ekonomi dan Integrasi Wilayah Nusa Tenggara*. Jakarta: Penerbit Daerah.

Sangadji, A. M. (1975). *Pembangunan Administrasi dan Infrastruktur Kalimantan*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI.

Sudharmono (1978). *Administrasi Pemerintahan dan Birokrasi Nasional*. Jakarta: Penerbit Pemerintah.

Salim, E. (1975). *Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Penerbit Nasional.

Zain, H. (1970). *Pendidikan dan Budaya Minangkabau*. Padang: Universitas Andalas Press.